

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar

“Pasca UU Kesehatan 2023 dan dilantiknya Kepala Daerah: Apakah Dinas Kesehatan perlu Merevisi Renstranya?”

A. Latar Belakang

Lingkungan sektor kesehatan mengalami perubahan yang sangat dinamis saat ini. Di tahun 2025 merupakan tahun ke 2 pelaksanaan UU Kesehatan 2023 dan tahun 1 adanya PP 28 tahun 2024. UU Kesehatan 2023 memberikan banyak perubahan dalam perencanaan kesehatan, termasuk tidak adanya mandatory spending dan adanya Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) serta penganggaran berbasis kinerja. Disamping itu koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kesehatan menjadi hal kunci yang perlu diperhatikan. Adanya UU Kesehatan 2023 ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Kepala Dinas Kesehatan untuk mengkoordinasi pengelolaan kesehatan di daerahnya, termasuk melakukan regulasi sumber daya manusia yang selama ini otoritasnya sebagian ada di organisasi profesi.

Di tahun 2025, sebagian provinsi dan kabupaten mempunyai kepala daerah yang baru, baru yang benar-benar baru, atau baru yang lama. Perubahan kepemimpinan di daerah akibat pemilihan kepala daerah baru sering kali membawa dinamika yang signifikan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam sektor kesehatan. Setiap kepala daerah memiliki visi dan misi yang berbeda, yang akan dituliskan dalam RPJMD, yang dapat mengarah pada perubahan kebijakan serta pergeseran prioritas dalam sistem kesehatan daerah. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi perangkat daerah dalam menyeimbangkan kesinambungan program yang sudah berjalan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan arah kebijakan baru.

Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini berpotensi melemahkan sistem kesehatan daerah, misalnya dengan terhentinya program yang sebelumnya telah berjalan efektif atau terjadinya ketidaksesuaian antara kebijakan baru dan kondisi lapangan. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga dapat menjadi peluang untuk melakukan pembaruan dan inovasi dalam sistem kesehatan, terutama jika kepala daerah yang baru memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan layanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat dan didukung dengan kebijakan yang tepat. Dalam

konteks dinamika lingkungan ini, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi menjadi respon terhadap dinamika lingkungan ini dan penting dalam usaha meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia. Dinamika lingkungan perlu dipahami dan ditafsirkan untuk menjadi pemicu untuk respon.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten yang ada sebaiknya direvisi dan disusun kembali dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan perintah UU Kesehatan 2024 dan prioritas kepala daerah yang baru tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan penyusunan yang matang, Renstra diharapkan dapat menjadi dokumen untuk menerjemahkan RPJMD dan RPJMN serta RIBK menjadi program-program kesehatan di daerah. Renstra Dinas Kesehatan diharapkan mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya pusat dan daerah, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta memperkuat pengelolaan kesehatan di daerah melalui kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, diperlukan revisi Renstra di Dinas Kesehatan, agar perubahan yang terjadi tidak hanya menjadi sekedar pergantian pimpinan daerah, tetapi juga membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi kesehatan masyarakat di daerah. Dalam revisi Renstra Dinas Kesehatan ini tentu diperlukan kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan dalam mengelola dinamika lingkungan sektor kesehatan ini.

B. Tujuan Webinar

Tujuan umum dari kegiatan webinar ini yaitu mengembangkan kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan respon terhadap dinamika lingkungan. Adapun tujuan khusus yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan pentingnya kepemimpinan dalam merespon dinamika lingkungan
- b. Memahami posisi dokumen rencana strategis dalam UU Perencanaan Pembangunan dan UU Kesehatan 2023.
- c. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menyesuaikan Renstra dengan visi-misi kepala daerah baru di dalam RPJMD yang akan disusun.
- d. Mendiskusikan perlunya revisi Rencana Strategis dan bagaimana cara melakukannya.

C. Sasaran Peserta

- Kepala Dinas Kesehatan dan staf di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia
- Akademisi dan peneliti di bidang kebijakan kesehatan
- Mahasiswa pascasarjana kebijakan dan manajemen kesehatan

D. Narasumber:

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan)
2. dr. Jusi Febrianto, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga)
3. drg. Iien Adriany, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur)

E. Moderator:

dr. Likke Prawidya Putri, MPH., PhD

D. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025

Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

Media : Hybrid (luring dan daring)

Daring : Zoom Meeting ID: 915 5990 3611

Passcode: KuliahTamu

Atau klik: <https://ugm.id/KuliahTamu200325>

Luring : Ruang U.25 Gedung Tahir Lantai 2

E. Jadwal Kegiatan

Waktu	Durasi	Topik	PIC/Narasumber
13.00-13.10	10'	Pembukaan	Moderator: dr. Likke Prawidya Putri, MPH., PhD
13.10-13.30	20'	Pengantar	Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD.
13.32-13.47	20'	Kebutuhan Revisi Renstra dari Perspektif Dinas Kesehatan Kabupaten	dr. Jusi Febrianto, MPH - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
13.50-14.10	20'	Kebutuhan Revisi Renstra dari Perspektif Dinas Kesehatan Provinsi	drg. Iien Adriany, M.Kes - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
14.10-14.40	30'	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
14.40-15.00	20'	Penutupan: Rencana Workshop Penyusunan Rencana Strategis	Moderator

F. Penutup

Dengan terselenggaranya webinar ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh:

- (1) wawasan yang lebih mendalam mengenai proses revisi Renstra pasca pelantikan kepala daerah, serta
- (2) menyiapkan tim Dinas Kesehatan untuk melakukan Revisi Renstra Dinas Kesehatan.